

SUARA AKADEMIK

Seperti Calo Di Stasiun Bus



Erwan Efendi

Keberadaan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) menjelang perhelatan demokrasi pada 2014 mendapat sorotan. Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Dr. Nyoman Subanda menilai DPD tidak maksimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di

daerah ke pusat (Waspada, 12/12).

Dari sisi komunikasi, penegasan Dr. Nyoman itu merupakan pesan langsung kepada masyarakat tentang keberadaan DPD di Senayan. Sisi kaca mata analisis wacana media, paling tidak ada dua pesan penting yang ingin disampaikan Nyoman kepada masyarakat; pertama keadaan DPD saat ini yang tidak maksimal memperjuangkan aspirasi daerah, dan kedua mengingatkan masyarakat pemilih agar lebih selektif dalam menentukan pilihan terhadap anggota DPD pada Pemilu 2014.

Secara psikologi dan jika masih mempunyai urat malu, penegasan itu merupakan pukulan menyakitkan dan menyekatkan nafas para anggota DPD. Di samping peringatan juga menyadarkan terhadap apa yang telah mereka lakukan selama di lembaga legislatif.

Sebagai pengamat politik, Nyoman prihatin dan kita pun kecewa melihat kinerja para anggota DPD yang tidak maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Apalagi, keberadaan mereka di Jakarta merupakan perpanjangan tangan yang dipilih langsung oleh masyarakat tanpa melalui proses partai politik.

Cukup banyak aspirasi masyarakat yang ditampung oleh anggota DPD, apalagi diantara mereka ada yang suka naik turun gunung dan ke luar masuk kampung. Berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat langsung direspon. Kehadiran mereka bagai Sipitung, membela kebenaran dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin. Media pun tidak ketinggalan ikut membangun pencitraan yang sedang dipertontonkan.

Padahal, semua itu hanya merupakan politik pencitraan. Prilaku itu semata-mata untuk kepentingan politik, bukan merupakan sosok sebenarnya. Sangat tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi, peran itu adalah bentuk kebohongan atau kepalsuan. Karena, sebelumnya, hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan, tapi tiba-tiba menjadi sosok orang yang cukup baik, pemurah dan pengasih.

Sadar dengan posisi itu, para calon anggota DPD apalagi bagi yang incumbent harusnya mampu mengendalikan diri, tidak terlalu terus turun naik gunung dan ke luar masuk kampung dengan menguber berbagai janji dalam upaya mendapat dukungan. Bahkan lebih lama tinggal di daerah dibanding di Senayan, sehingga tidak tahu kapan menyampaikan aspirasi yang ditampung dari masyarakat.

Padahal, sungguh sangat banyak harapan kita kepada lembaga yang dilahirkan pada pasca reformasi itu dalam upaya mengubah nasib serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat di daerah. Mereka diyakini mampu menyuarakan berbagai kepentingan daerah karena ketokohnya.

Memang secara konstitusi, anggota DPD hanya menampung dan menyalurkan aspirasi, tidak ikut dalam mengambil keputusan. Para anggota DPD terpaksa memosisikan diri sebagai penonton ketika para anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) melakukan sidang untuk mengambil keputusan politik.

Jika seperti itu keberadaan DPD, itu hampir sama seperti kerja calon di stasiun bus, merekrut penumpang untuk angkutan yang dikendalikan orang lain bukan dirinya sendiri. Kita tentu tidak mau kalau DPD menjadi 'calo' aspirasi di Senayan. Negara pun rugi mengeluarkan anggaran karena tidak ada umpan balik yang dapat diperoleh, karena terbelenggu peraturan.

Padahal, melihat proses pengangkatannya, DPD harusnya ikut dalam mengambil keputusan politik sama seperti anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), karena dipilih langsung masyarakat, dan itu artinya, mereka benar-benar merupakan pilihan rakyat tanpa perantara proses partai.

Kita tidak ingin kalau kenerja anggota DPD di Senayan tidak maksimal dalam memperjuangkan kepentingan publik di daerah. Harusnya mereka gigih dan tangguh dalam memperjuangkan kepentingan daerah seperti juga kegigihan mereka dalam mencari dan meminta dukungan masyarakat. Semoga.

